



## SILPA Capai Rp 1 Triliun

**GUBERNUR** Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji, belum lama ini menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan program serta implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Meski secara umum berjalan lancar, ia mengakui ada hal-hal yang perlu disampaikan ke publik.

Salah satunya terkait penyerapan anggaran. Di mana tahun ini perkiraan serapan anggaran hanya mencapai sekitar 91 persen. Jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai angka 98 persen. Akibatnya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga cukup tinggi. Yakni mencapai sekitar Rp 1 triliun lebih. "Supaya tidak kaget saya sampaikan pertama penyerapan anggaran tahun ini tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu bisa 98 persen lebih, tahun ini

perkiraan cuma 91-an persen. Masih perkiraan bisa tidak sampai bisa lebih," katanya saat coffee morning bersama awak media, akhir Desember 2019.

Ia menyebutkan banyak program kegiatan yang nilainya cukup besar sengaja ditunda ke tahun 2020. Jumlahnya ada sekitar 11 proyek. Itu karena, waktu yang ada tidak memungkinkan untuk penyelesaian. "Padahal itu sudah dianggarkan. Jadi jangan kaget kalau SILPA di atas Rp 1 triliun. Ini akibat pertama saya tidak ingin kegiatan proyek pengerjaannya tergesa-gesa," terangnya.

Seperti dicontohkannya kejadian runtuhnya abutment jembatan Sungai Tebas, Ruas Jalan Lingkar Tebas, Kabupaten Sambas pada

■ Bersambung ke hal. 10

## SILPA Capai Rp 1 Triliun

Sambungan Hal.9

Minggu (22/12). Itu terjadi menurutnya, akibat ingin cepat dalam pengerjaan dan diburu waktu. "Harusnya kalau memang tak cukup waktu sudah jangan ditender. Kecuali perusahaan yang benar-benar bonafit dan kualifikasinya bagus," ujarnya. Belum lagi kebanyakan pengerjaan

proyek memang baru akan direalisasikan oleh OPD terkait di akhir tahun. Sehingga waktu yang tersisa sangat mepet. "Ini konsekuensi bekerja selalu di akhir tahun. Saya ingin ke depan perwujudan harus direncanakan secara ketat," tegasnya.

Midji sapaan akrabnya me-

nyebut, salah satu proyek yang ditunda adalah pembangunan pagar kantor dan pendopo gubernur. Itu dilakukan karena pekerja memerlukan waktu yang benar-benar cukup. Terutama untuk ukiran pagar kayu yang memang butuh ketelatenan dalam pengerjaannya. **(ang)**